

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah dapat menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut. Kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang atau sekelompok orang yang kurang mampu atau rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor yaitu, seseorang atau sekelompok masyarakat misalnya hanya memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal untuk berusaha, dan tidak tersedianya lapangan kerja.

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus di kaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia sebagai negara berkembang juga masih dilanda masalah kemiskinan.

Kemiskinan menjadi masalah yang sangat penting karena akan berpengaruh buruk terhadap banyak aspek kehidupan dan menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, putus sekolah, dan kesehatan yang memburuk.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan program dalam upaya peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga yang kurang

mampu atau miskin. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH), seperti diatur dalam pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial (bansos) bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum.

PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Dengan PKH diharapkan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No.32/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim pengendali Program Keluarga Harapan, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dibentuk sejak 2007 silam dan berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk provinsi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Tim koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota

Tujuan utama adanya program PKH yaitu dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya hidup keluarga kurang mampu dan dapat mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari keluarga yang kurang mampu. Dimana secara khusus tujuan PKH untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, dan meningkatkan status kesehatan gizi. Dengan adanya bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan menurunkan kesenjangan ekonomi.

Secara umum, program ini memberikan bantuan uang kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan RTSM tersebut harus melakukan persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan yang dimaksud yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan.

Dari penerapan program tersebut, perlunya evaluasi agar program yang dilaksanakan dapat diketahui keberhasilannya dan kegagalan dari program tersebut. Evaluasi merupakan penilaian. Dengan mengevaluasi, maka program tersebut dapat diketahui kelemahan dan keunggulan. Kelemahan akan diantisipasi agar dapat diperbaiki dan keunggulan dapat lebih ditingkatkan lagi. Sehingga program yang diterapkan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Kabupaten Humbang Hasundutan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai diberlakukan pada tahun 2014, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Kecamatan Onan Ganjang dan salah satu desa yang ada di Kecamatan Onan Ganjang yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Desa Onan Ganjang. Dimana di desa ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu atau tidak sejahtera yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu salah satu penyebabnya rendahnya sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam memanfaatkan peluang kerja. Masalah tersebut yang mengakibatkan adanya pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia dilatarbelakangi oleh tingkat

pendidikan dan kesehatan yang masih rendah serta kebanyakan masyarakat desa Onan Ganjang yang lebih memilih bekerja di usia muda sebagai petani. Dengan demikian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program ini tidak terlepas dari berbagai masalah. Permasalahan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) seperti, *pertama* proses penyaluran pencairan dana kepada RTSM yang tidak tepat waktu, *kedua* RTSM menggunakan dana bantuan belum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah yaitu untuk pendidikan dan kesehatan.

Dengan permasalahan yang ada di lapangan, terkait dengan Program Keluarga Harapan di Desa Onan Ganjang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah Apakah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Onan Ganjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Onan Ganjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pada peneliti tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onan Ganjang.

2. Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga mampu memberikan kebijakan yang berkesinambungan.

3. Masyarakat desa

Sebagai informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana mestinya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dilaksanakan.

4. Akademik

Dapat menjadi referensi, rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai Program Keluarga Harapan (PKH)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, (2020:21) Implementasi artinya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan muncul manakala dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik, oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Menurut Tresiana dan Duadji (2019:2) pemahaman umum mengenai pengertian Implementasi Kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan beberapa para ahli sebagai berikut:

1. Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses Implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.
2. Van Meter dan Van Horn memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
3. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, mengartikan bahwa Implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan.
4. Patton dan Sawicki, bahwa Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Meter dan Horn (dalam Grindle 1980) bahwa “tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”. Kegagalan implementasi adalah faktor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidak

tetapan atau ketidak tegasan intern maupun ektern, penyebab kegagalan sebuah kebijakan yaitu:

1. Bad policy: perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan.
2. Bad implementation: pelaksana tak memahami petunjuk pelaksana, dan terjadi implementasi yang buruk

Maka dari itu ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Isu kebijakan, implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidaktegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Informasi, kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat.
3. Dukungan, implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila mana pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

2.1.1 Unsur-Unsur Implementasi

Unsur-unsur Implementasi kebijakan publik menurut Tacjhan dalam Prisca (2020) adalah :

1. Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, yaitu pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

2. Program yang dilaksanakan Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakantindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Sasaran yang dikehendaki
 - b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
 - c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
 - d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan

e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

a. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.

b. Melaksanakan (application) program dengan mendayagunakan strukturstruktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat

c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

3. Target Group atau Kelompok Sasaran Target Group atau Kelompok Sasaran dapat didefenisikan yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran, seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, serta kondisi sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

2.1.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-ciri yang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Abidin dalam Prisca (2020), bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias. Dalam pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kepastian dalam pelaksanaan sesuatu kebijakan yang siap diimplementasikan.

2. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.

3. Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan.

4. Rumusan kebijakan yang jelas.

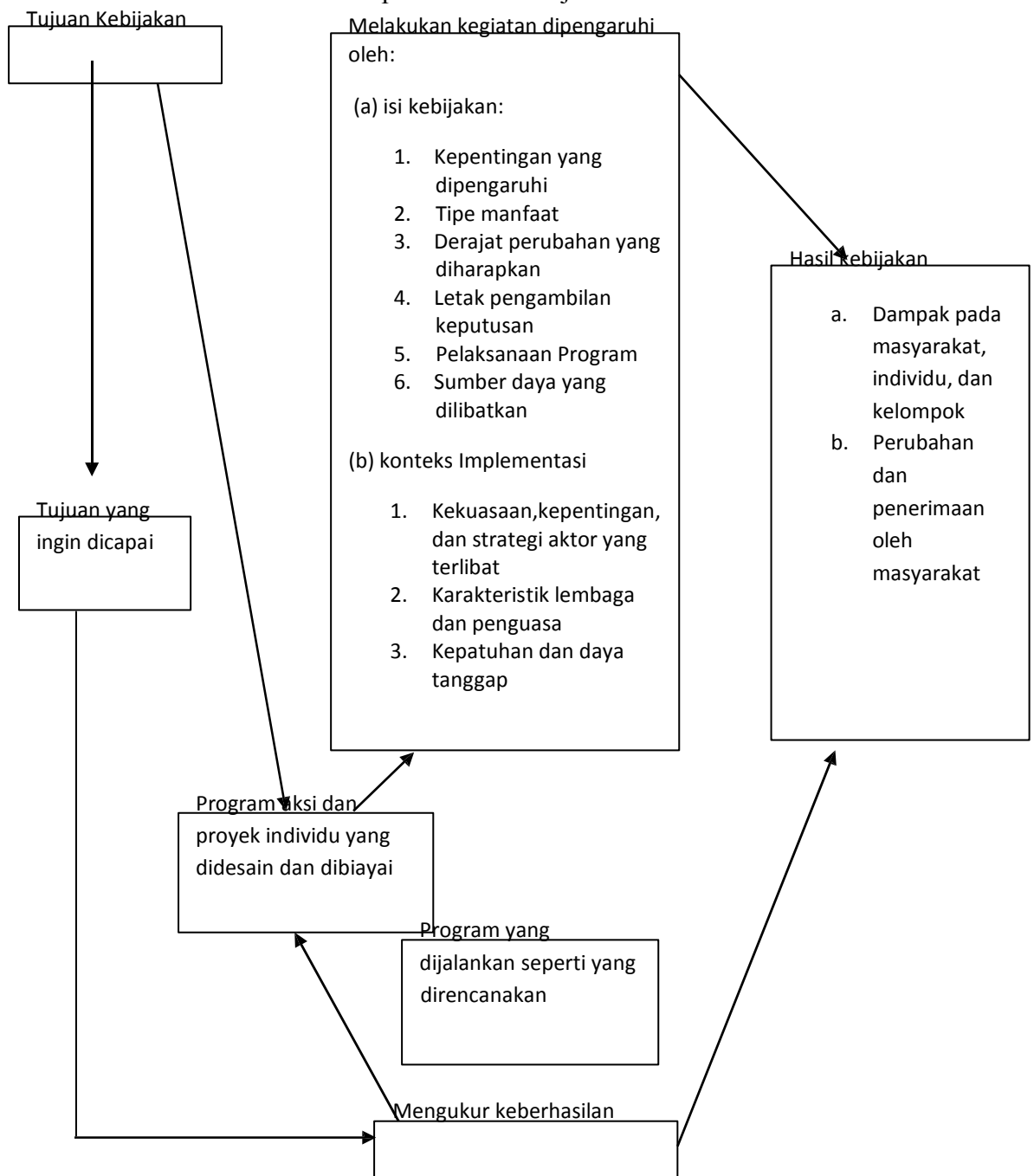
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan yaitu:

1. Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle Implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Prisca (2020) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan

ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus tergantung pada implementability dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle



Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, (6) sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud: (1) kekuasaan (power) dan strategi aktor yang terlibat (Interest strategies of actors involved), (2) karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics), (3) kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness). Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan sangat sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan. Sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya. Maksud konten adalah bahwa kebijakan yang akan diambil dipengaruhi oleh : 1) Kepentingan yang dipengaruhi (terpengaruh oleh kebijakan); bahwa setiap kebijakan yang akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan. 2) Tipe/jenis manfaat yang akan dihasilkan; bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macammacam tujuan yang ingin dicapai dengan cara mana tujuan-tujuan itu dirumuskan 3) Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang ditetapkan yang mengharapkan adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, tetapi untuk program yang dirancang pada perubahan mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan sulit diimplementasikan. 4) Kedudukan/letak pengambil keputusan (pembuat kebijakan); bahwa kebijakan tertentu berkaitan dengan kewenangan dan

kerumitan dalam pengambilan keputusan terhadap tingkat (nasional dan lokal) dan jumlah orang atau unit dalam pengambilan keputusan 5) Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program (lintas geografi dan organisasi), kebijakan dengan lintas geografi dan organisasi yang tinggi akan lebih sulit menjalankan program (kebijakan) dan semakin memerlukan pengambilan keputusan. 6) Sumber daya yang dikerahkan/dilibatkan, bahwa setiap keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan.

Konteks (lingkungan) politik, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; bahwa yang akan mengimplementasikan mungkin mencakup banyak aktor. Masing-masing aktor mungkin memiliki kepentingan-kepentingan dalam kebijakan/program dengan membuat tuntutan (permintaan) atas pengalokasian prosedur-prosedur. Seringkali tujuan dari aktor bertentangan dengan aktor lainnya, termasuk pada hasil dan konsekuensi siapa mendapatkan apa. Akan ditentukan melalui strategi, sumberdaya dan posisi kekuasaan masing-masing aktor.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa/resmi; bahwa apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik dari kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber

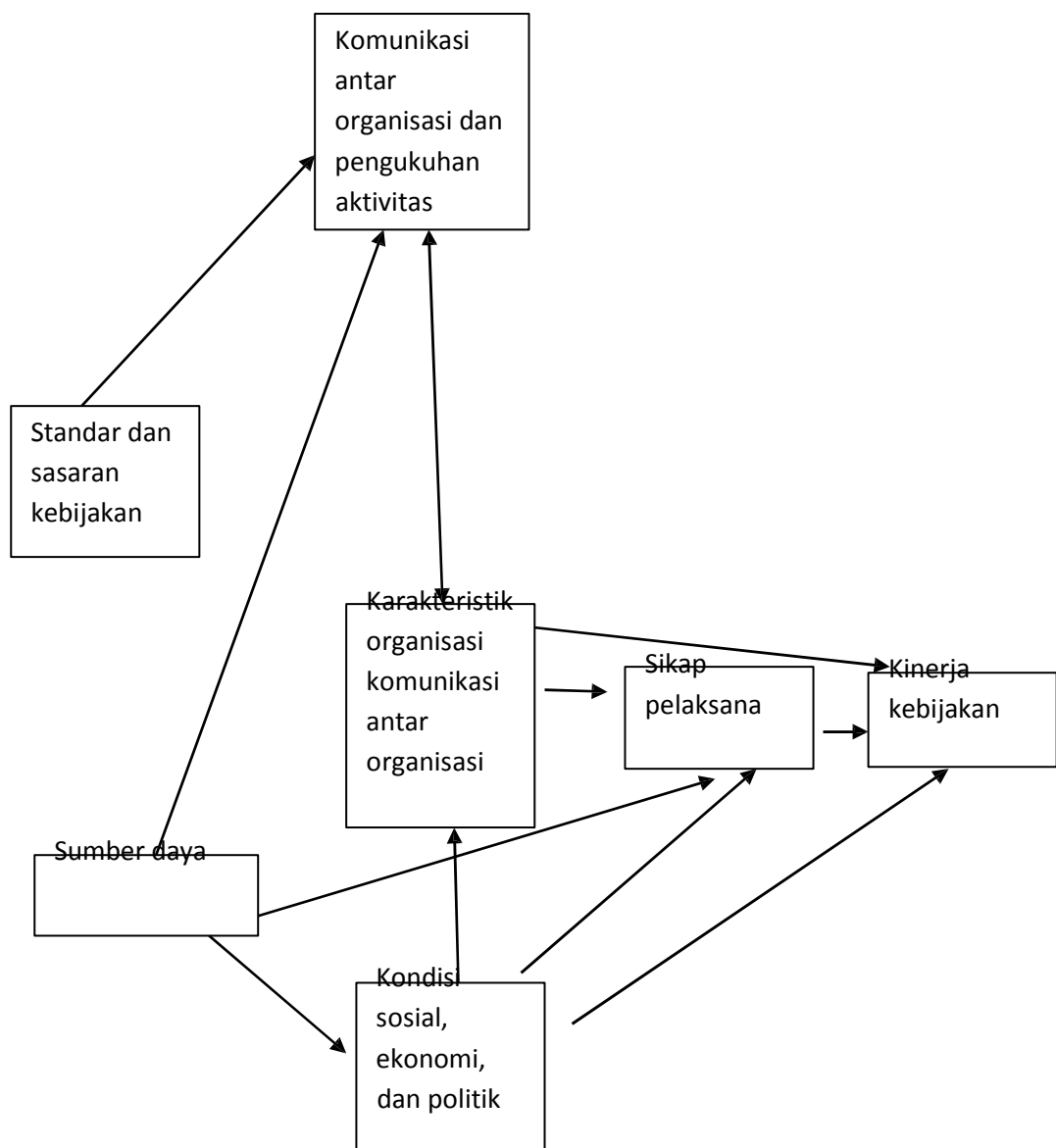
daya yang terbatas, respon dari petugas yang mengimplementasikan, dan tindakan-tindakan elit politik, semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan masing-masing.

3. Ketaatan/kepatuhan dan daya tanggap; bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul dari interaksi antara lingkungan program dan administrasi program. Yang pertama, birokrat harus berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan bagaimana menjaga ketaatan agar hasil akhir dari kebijakan dapat dicapai walaupun mereka harus menangani berbagai interaksi diantara aktor yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan tersebut. Yang kedua, bagaimana responsivitas dari birokrat terhadap keinginan-keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari pelayanan yang diberikannya agar tujuan kebijakan dan program dapat tercapai. Agar efektif maka implementor harus memiliki seni dalam berpolitik dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan merealisasikan kebijakan dan program-programnya.
2. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn Meter dan Horn (1975)

Merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa (1994:19) Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja

yang tinggi berlangsung dalam antarmubungan berbagai faktor sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini :

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn



Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian terhadap tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan sebagai kriteria penelitian, maka standar sasaran dirumuskan secara spesifik dan kongkret. Untuk dapat menangkap tujuan spesifik yang diinginkan suatu kebijakan, maka evaluator perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakannya itu. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana maupun intensif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai. Persoalannya adalah berapakah dan minimal yang harus tersedia untuk mengimplementasikan suatu kebijakan? Dalam perspektif ini evaluator dapat menguji efisiensi dari implementasi kebijakan yang dikajinya. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadi penyimpangan. Ini menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Organisasi atasan (superior) mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana. Persolan di atas juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma, dan pola hubungan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Sebagaimana dapat diambil inferensi logis dari bagan sistem kebijakan di atas, kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Kesemua variabel tadi membentuk

sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. na untuk memiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan.

2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.2.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial (bansos) bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PKH di Indonesia dimulai tahun 2007, dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada keluarga yang kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial, PKH juga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat PKH adalah:

1. Dalam jangka pendek yaitu memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

2. Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dan memberikan kepastian akan masa depannya.
3. Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung.
4. Mengurangi pekerja anak, yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja dijalanan, serta mencegah RTSM menjadi tuna sosial dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui complementary perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, Pengembangan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

2.2.2. Dasar hukum pelaksanaan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang RI Nomor 40, Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Peraturan pemerintah Nomor 205 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.166 Tahun 2014 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan
8. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
9. Peraturan Menteri Sosial No.184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
10. Peraturan Menteri Sosial No.10/HUK/2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
11. Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

2.2.3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk :

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Sedangkan secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari Keluarga Sangat Miskin (KSM)
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM

4. Meningkatnya taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.

Sementara itu, tujuan operasional PKH adalah:

1. Di bidang kesehatan yaitu, meningkatkan akses RTSM terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan status kesehatan
2. Di bidang pendidikan yaitu, meningkatkan akses anak-anak RTSM terhadap pendidikan dasar agar tidak terjadi anak putus sekolah.

2.2.4. Kriteria komponen

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 1. Ibu hamil/menyusui, dan
 2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 1. Anak SD/MI atau sederajat
 2. Anak SMP/MTs atau sederajat
 3. Anak SMA/MA atau sederajat
 4. Anak usia enam sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 1. Lanjut usia mulai dari 60

2. Penyandang disabilitas berat

2.2.5 Hak dan Kewajiban PKH

1. Hak peserta PKH

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan seperti:

- a. Bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan beban atau tanggungan yang ada di RSTM.
- b. Menerima pelayanan kesehatan
- c. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban Peserta PKH

- a. Anak usia 0-6 tahun dan ibu hamil wajib mengikuti persyaratan seluruh protokol pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan
- b. Anak usia 6-15 tahun wajib didaftarkan dan disekolahkan ke SD/MI atau SLTP/MTS dan hadir di kelas minimal 85 persen dalam sebulan
- c. Anak usia 15-18 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil sekolah kesetaraan.

2.2.6 Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan atau Ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu dan wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan.

2.3 Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “Sejahtera”. Sejahtera ini berasal dari bahasa sansekerta “Catera” yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “Catera” (Payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan menurut Midgley (dalam Isbandi 2015:23) kesejahteraan merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik. Dengan terpenuhi kebutuhan manusia baik secara materil maupun spritual maka dapat dikatakan sejahtera.

Konsepsi kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa :

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhankebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

2.3.1 Tujuan Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.3.2 Fungsi Kesejahteraan

Fungsi-fungsi kesejahteraan antara lain:

1. Fungsi pencegahan
Kesejahteraan ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah baru.
2. Fungsi penyembuhan
Kesejahteraan ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan.
3. Fungsi Pengembangan

Kesejahteraan berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain

2.3.3 Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut BPS

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
3. Fasilitas tempat tinggal
4. Keadaan tempat tinggal
5. Kesehatan anggota keluarga
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan
7. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

2.4 Teori Kemiskinan

Kemiskinan masalah sosial yang senantiasa selalu hadir ditengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Masalah kemiskinan begitu menarik untuk dibahas diberbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi. Kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan

kesehatan. Dari definisi tersebut diperoleh bahwa kemiskinan merupakan seseorang yang tidak menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan seperti tidak memenuhi kebebasan, hidup layak, kesehatan dan pendidikan. Menurut Suharto (dalam Agus 2014:9) menyatakan bahwa

kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan actual dari masa kemasa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Menurut Wilkinson (dalam Suyanto 2018:5) ketidaksamaan dan kesenjangan bukan hanya menyebabkan ketimpangan kesempatan maju, tetapi juga menyebabkan biaya sosial yang ditanggung menjadi jauh lebih mahal. Sebuah bangsa yang direcoki masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, kesempatan untuk maju bersaing sejajar dengan bangsa yang lain niscaya akan menghadapi berbagai tantangan internal yang kontar-produktif. Sejalan dengan Nugroho dan Dahuri (2012) kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif disuatu wilayah dimana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kehidupan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang belaku.

Menurut Suharto (dalam Agus 2014:9) menyatakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya merupakan “persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan actual dari masa ke masa”. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. Kemiskinan

adalah masalah sosial yang senantiasa selalu hadir ditengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Masalah kemiskinan begitu menarik untuk dibahas diberbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi.

Kebijakan dan program pembangunan yang semestinya bisa digulirkan dengan adil dan merata, kemungkinan malah akan melahirkan efek samping pembangunan yang merugikan. Selama ini banyak bukti program pengentasan kemiskinan yang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi dan hanya dilakukan dengan logika. Pada akhirnya tidak melahirkan pemikiran sosial masyarakat yang makin lebar karena tidak menjamin distribusi kesejahteraan yang merata.

Menurut Haungton dan Khandker (2012:157) penyebab-penyebab utama atau paling tidak berhubungan dengan kemiskinan mencakup tiga karakteristik yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu. Karakteristik wilayah mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, kualitas pemerintah, serta hak miliki dan pelaksananya. Sementara karakteristik masyarakat mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik), layanan pendidikan dan kesehatan. Aspek ekonomi seperti status pekerjaan, jam kerja dan harta benda yang dimiliki. Sejalan dengan Chaniago (2012:200) mengatakan akibat tidak adanya kepekaan terhadap ketimpangan sosial, kebijakan sosial untuk pemerataan yang dibuat pemerintah tidak efektif mencapai sasaran, kecuali keberhasilan yang tampak pada angka-angka statistik yang tidak punya konteks struktural kuantitatif.

Menurut suyanto (2018) kemiskinan merupakan tingkat pendapatan dibawah pendapatan garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan dalam kesejahteraan sosial akan mempersulit terpenuhinya berbagai kebutuhan gizi atau kemampuan untuk tidak sakit, sehingga tidak mengherankan apabila dilingkungan mereka tingkat kematian yang sangat tinggi.

Berbagai paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, meskipun dimaksud untuk mendongkrak pendapatan mereka. Namun demikian, hasilnya di lapangan acapkali malah berbalikan. Ketika harga beras naik dipasaran, misalnya para petani yang merupakan produsen komoditi utama pangan ini, ternyata justru hanya membayar lebih mahal apa yang mereka hasilkan, sebab yang dihasilkan petani hanya sebatas gabah, yang kemudian harganya naik tajam tatkala sudah diproses menjadi beras oleh pengusaha-pengusaha lokal yang memiliki mesin.

Secara umum, kemiskinan diasrtikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah “kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”.

2.4.1. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Menurut Thomson Dkk (2015) kemiskinan memiliki bentuk-bentuk kemiskinan yaitu :

1. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yan terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan standar kesejahteraan.
3. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau memperbaiki taraf hidup deng an tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros, kurang kreatif dan relatif tergantung pada orang lain.
4. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan stuktural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suat tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang bersumber dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu dalam penelitian masalah yang akan dilakukan oleh peneliti. Dasar itu berupa penelitian terdahulu yang pembahasan atau topiknya hampir sama dengan topik peneliti ambil yaitu mengenai evaluasi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian terdahulu dapat menjadi refnsi dalam pemikiran peneliti baik berupa teori kajian pustaka maupun dalam mencari literatur yang menyangkut tentang evaluasi implementasi suatu program PKH.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan yang pertama yaitu skripsi milik Achmad Suharyo (2016) yang berjudul “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung”. Metode pengumpulan data di penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan implementasi Kebijakan PKH Dalam menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui dimensi yaitu, pertama melalui komunikasi, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) telah disosialisasikan, walaupun masih ada masyarakat yang menginginkan pelayanan lebih baik, kedua Sumber Daya Manusia, pelaksana/pendamping yang relatif kurang, ketiga disposisi/sikap pelaksana yang belum optimal dalam melaksanakan kebijakan, dan keempat struktur birokrasi yang nampak kurangnya fungsi masing-masing struktur sehingga tidak berjalan optimal.

Penelitian yang kedua yaitu milik Nurul Irtiah Fajriati (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tungkai Ilir, dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kuantitatif melalui metode deskriptif. Dari hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tungkai Ilir.

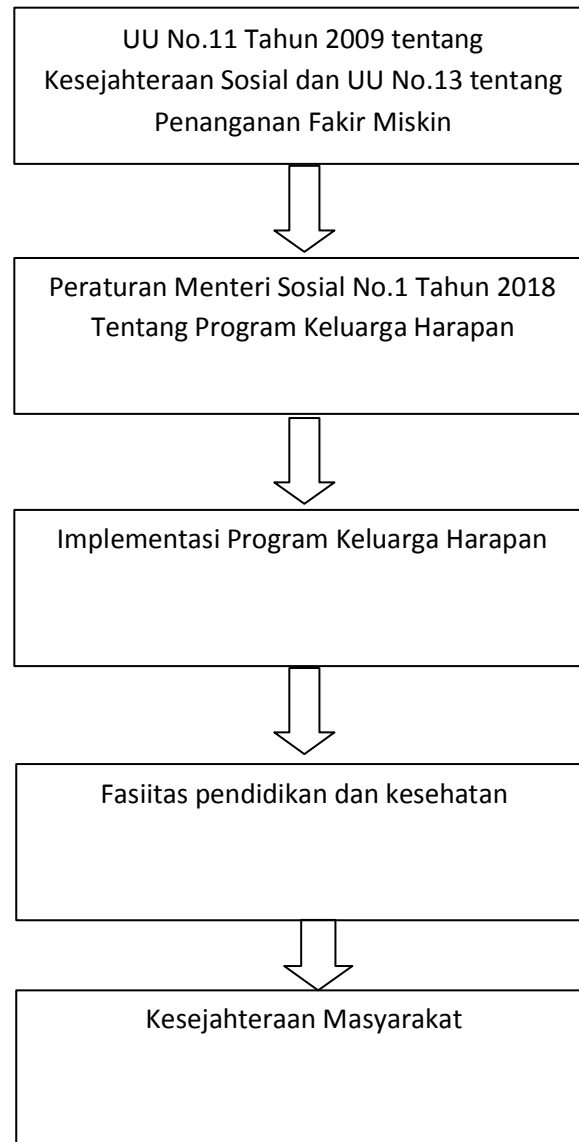
Penelitian yang ketiga yaitu milik Lina Wati (2020) yang berjudul Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli. Jenis

penelitian yang menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang adalah Asosiatif Kuantitatif. Dari Hasil penelitian bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dinyatakan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Penelitian yang keempat yaitu milik Nurul Indah Sari (2020) yang berjudul Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara Kurang terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini karena masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penetapan peserta PKH, serta tidak tepat waktu dan tepat jumlah.

Dari keempat penelitian tersebut, peneliti dapat memahami dan menambah pengetahuan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu timbul di tengah kehidupan masyarakat sehingga membawa dampak bagi masyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan sampai pemenuhan kesehatan. Tanggungjawab kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian, sektor ataupun bidang tertentu sehingga pemerintah membuat

program yang profesional. Dalam rangka percepatan menangani kemiskinan pemerintah banyak membuat program yang mengarah kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No.13 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Salah satunya yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan adanya program tersebut dapat memutus rantai kemiskinan.

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. PKH membuka akses untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan bagi KPM terutama Ibu hamil dan anak, dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di lingkungan mereka. Misi dari Program Keluarga Harapan (PKH) mengupayakan perubahan kehidupan masyarakat dan pola pikir keluarga peserta terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga berkurangnya anak-anak yang putus sekolah dan meningkatnya kesehatan terutama Ibu hamil bagi keluarga kurang mampu. Dengan kebijakan Pemerintah mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) maka masyarakat dapat terbantu untuk meningkatkan kesejahteraannya baik itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memenuhi fasilitas kesehatan dan pendidikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Creswell menyatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data dari masalah yang akan diteliti, penelitian itu dilaksanakan di desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Juli 2021.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Bungin (2015:78) informan penelitian adalah “subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti menentukan informan dan bagaimana peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami pula masyarakat dimana penelitian itu dilaksanakan.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Informan kunci

merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci yaitu, Kepala Desa, Pendamping PKH

2. Informan Utama, merupakan mereka yang merasakan langsung Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Masyarakat penerima PKH di Desa Onan Ganjang, penentuan masyarakat yang akan dijadikan informan utama dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling.

3.4 Jenis dan Teknik pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang dapat diamati dari objek penelitian. Data Primer ini dapat diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari para informan. Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan secara lisan kepada informan kunci yaitu Pendamping PKH Desa Onan Ganjang, Kepala Desa Onan Ganjang dan Informan Utama adalah Masyarakat penerima PKH.

b. Observasi

Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dikumpulkan atau data yang sudah tersedia untuk peneliti yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder adalah data olahan yang diperoleh dengan :

- a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Kepustakaan
Kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

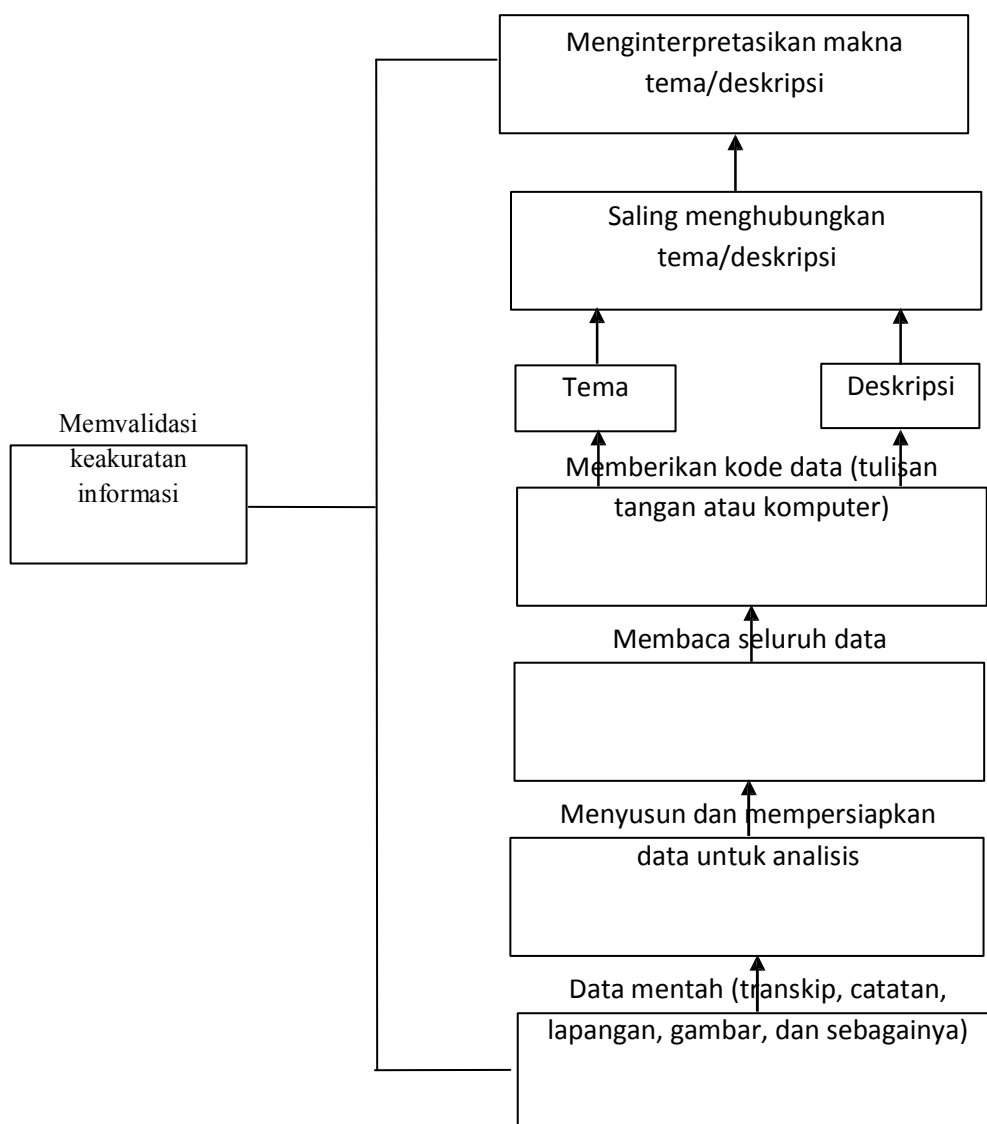
3.5 Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

Menurut Jhon.W Creswell (2016) langkah-langkah teknik analisis data sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-scanning materi mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf.

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam settingan tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini dan akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.



Gambar 3.1 Teknik Analisa Data